Ema Sumarna Yakin, Kepolisian Akan Selesaikan Persoalan Kriminalitas

BANDUNG (IM)- Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, bahwa Kota Bandung relatif masih kondusif meski masih banyaknya peristiwa kriminal. Ema Sumarna percaya, pihak kepolisian terus menerus menindak segala bentuk kriminalitas. Termasuk kejahatan geng motor, yang kerap meresahkan masyarakat di Kota Bandung.

"Saya masih sangat-sangat percaya penuh kepada pihak kepolisian. Saya dengar langsung bagaimana komitmen Kapolrestabes, didukung jajaran di bawahnya. Ini terus berproses," kata Ema Sumarna, Jumat (26/5).

Terlepas itu, Ema mengaku telah bertemu dengan sejumlah kelompok bermotor. Pihaknya mengajak para petinggi untuk meminimalisir potensi oknum-oknum yang membuat citra kelompok tersebut menjadi buruk. "Sebenarnya tujuan mereka baik. Tetapi ada oknum yang menyimpang dari nilai-nilai ketenteraman, ketertiban umum. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi," ucapnya.

Ema menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ke depan akan terus menambah keberadaan kamera CCTV. Hal tersebut perlu segera dilakukan untuk mendukung petugas di lapangan. "Kalau hanya mengandalkan petugas di lapangan kan jumlahnya terbatas. Kota Bandung kota tujuan, di mana semua orang datang ke Bandung. Tentu kamera CCTV akan terus kita perbanyak," ujar dia.

Keberadaan geng motor kian meresahkan masyarakat di Kota Bandung. Geng motor kembali beraksi di Jalan Soekarno Hatta di depan Apartemen Panoramic, dan di Jalan Jakarta pada pekan kemarin. ● **pur**

OPD di Kabupaten Cirebon Awal Bulan Depan Harus Terapkan TTE

CIREBON (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i, mengapresiasi terobosan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Terobosan itu berkaitan dengan akan diterapkannya Tanda Tangan Elektronik (TTE).

"Tandatangan elektronik salah satu ciri layanan birokrasi modern, layanan birokrasi kelas dunia," kata Hilmy usai menghadiri kegiatan Kick off Meeting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE Jumat (26/5).

Menurutnya, birokrasi modern memang harus didukung layanan yang tepat, cepat, dan efesien. Justru dengan program seperti itu, dari sisi anggaran akan lebih hemat. Pasalnya, tidak memerlukan kertas. Dengan hadirnya TTE ini, berkas-berkas yang harus memakai sarana kertas, tergantikan memakai layanan digital.

"Dari sisi anggaran jelas lebih murah karena kita tidak harus membeli kertas. Dari segi kecepatan juga sangat menghemat waktu," ungkapnya.

Terkait sisi keamanan data, Sekda mengaku tidak khawatir. Nanti ada petugas yang akan mengontrol isi surat tersebut, karena tidak mungkin tidak dikontrol. Seperti, kepala dinas ketika hendak memaraf, dengan kesibukan tingkat tinggi, maka harus ditunjuk kepada orang yang paham isi surat tersebut.

"Di jajaran Sekda dan bupati, juga pasti harus ditunjuk yang bertanggungjawab, atau bisa disebut admin yang tugasnya mengamati isi surat. Baik dari segi redaksi, isi surat, kemudian struktur suratnya harus diamati. Sehingga, para pejabat ketika mau paraf, tinggal klik saja, karena semuanya sudah diperiksa," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menambahkan, tahapan perencanaan sudah berjalan dan sosialisasi sudah dilakukan. Saat ini tinggal di masa transisi, percepatan langsung untuk lebih efektif lagi ke semua perangkat daerah. ● **pra**

IDN/ANTARA

GEOPARK IJEN MASUK UNESCO GLOBAL GEOPARK

Pengunjung mengamati papan informasi kawasan Geopark Ijen di Geopark Information Center, Disbudpar Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (26/5). UNESCO menetapkan Geopark Ijen menjadi bagian dari 195 situs UNESCO Global Geopark (UGG) yang tersebar di 48 negara.

Diiming-iming Ada Lowongan Kerja di Bandung Zoo, Puluhan Orang Tertipu

BANDUNG (IM)- Sebanyak 41 orang menjadi korban penipuan. Uang mereka dibawa kabur seseorang berinisial FM, setelah para korban diiming-imingi dapat bekerja di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). FM sendiri, dari informasi yang dihimpun, merupakan volunteer edukator Bandung Zoo. Salah seorang korban penipuan, Septian (24) mengatakan ia dimintai sejumlah uang agar dapat bekerja di Bandung Zoo.

"Jadi kita awalnya ditawari lowongan pekerjaan di Bandung Zoo oleh FM. Kita ditawari loker itu untuk bisa bekerja di Kebun Binatang Bandung dengan berbagai posisi," jelas Septian, Jumat (26/5).

Kepada setiap korbannya, FM mengaku sebagai salah satu kepala edukator yang bekerja di Kebun Binatang Bandung. FM menawarkan berbagai posisi agar para korbannya dapat percaya. Adapun posisi yang ditawarkan FM mulai dari penerima tiket, pemasaran, sampai asisten edukator. "Jadi setelah menyebut ada lowongan, FM meminta sejumlah uang kepada para korban yang katanya untuk biaya administrasi. Kami total 41 orang memberikan uang kepada FM bervariasi, mulai dari Rp350 ribu hingga Rp1 juta," kata dia.

Untuk melancarkan aksinya serta meyakinkan para korbannya, FM membuat surat palsu atas nama PT. Yayasan Margasatwa Tamansari yang seolah menerangkan bahwa para korban sudah diterima bekerja di Bandung Zoo selang beberapa hari mereka memberikan uang kepada FM.

"Lalu FM memberikan kita surat kontrak kerja palsu yang menyebut bahwa kita diterima dan mulai bekerja di Kebun Binatang Bandung. Tanggalnya bervariasi, ada yang mulai tanggal 2 Juni hingga 5 Juni," jelasnya.

Namun panggilan yang dijanjikan pun tak kunjung datang. FM pun menghilang tak ada kabar sampai saat ini.

Setelah bertemu dengan perwakilan manajemen Bandung Zoo, para pelamar akhirnya tahu bahwa mereka ditipu oleh FM.

"Kita mengaku rugi, semoga FM bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ada itikad baik untuk mengembalikan uang kami. Bukan masalah nominal, tapi tanggung jawabnya jika tidak. Kami juga sudah lapor ke polisi atas tindakan penipuan ini," kata dia. ● **pur**

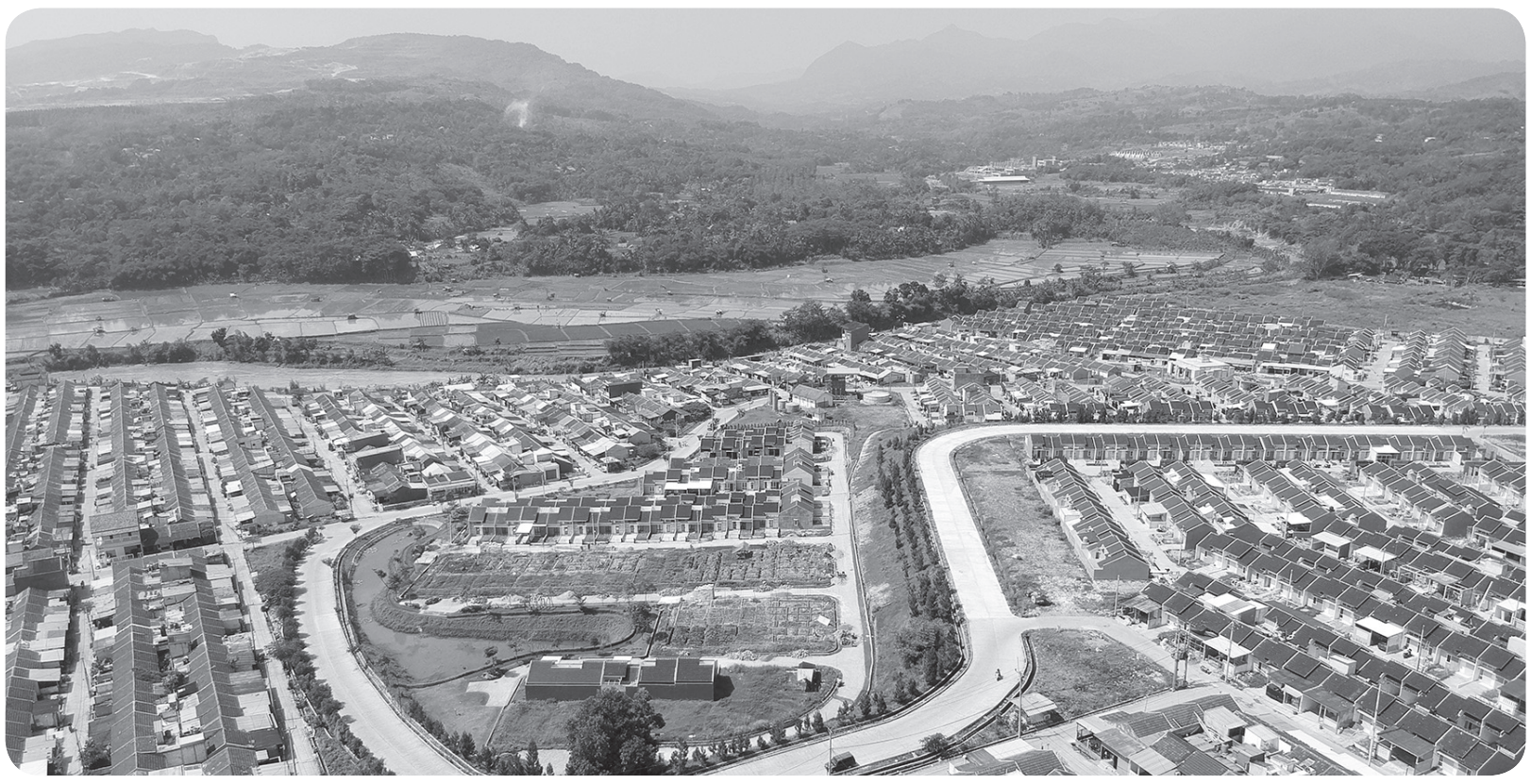

IDN/ANTARA

BANTUAN INSENTIF PSU RUMAH SUBSIDI

Foto udara pembangunan rumah subsidi di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/5). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan bantuan insentif prasarana, sarana dan utilitas (PSU) meringankan pengembang perumahan dalam membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Polemik Jalan Desa di Sentul City, Warga Siapkan Bukti-bukti

Pihak Sentul City mengklaim jalan tersebut merupakan hak guna bangunan di bawah kendalinya. Jalan desa itu disebut sebagai 'pinjaman' sementara perusahaan untuk sebuah pesantren yang berada di area tersebut lantaran memerlukan sebuah jalan. Sementara warga mengungkapkan fakta lain, di mana jalan itu sudah ada sejak puluhan tahun silam sebelum ada pesantren.

BOGOR (IM)- Polemik status lahan jalan desa antara Sentul City dan warga di Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, masih berlanjut. Kini, warga menyiapkan bukti-bukti untuk melawan.

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (26/5), salah satu masyarakat yang swadaya membangun jalan, Sutrisno Iwantono, mengatakan pihak Sentul City mengirim orang tanpa surat tugas menyetop perbaikan jalan desa. Sutrisno kemudian menanyakan terkait alat bukti kalau jalan desa itu milik pihak Sentul City.

"Dia mengakui kirim orang, tetapi tanpa surat tugas, juga tanpa identitas, karena saat itu kita nggak tau siapa orang itu, kemudian dia menyetop (perbaikan jalan) katanya punya dia, saya tanya mana alat buktinya bahwa jalan itu bersertifikat atas nama Sentul? Kan dia nggak bisa menunjukkan juga, sedangkan saya jelas di dalam surat saya sertifikat hak milik dan di situ dinyatakan jalan desa, jadi kalau berargumen nggak bisa dengan menyatakan katanya atau data internal saya," kata Sutrisno.

Pihak Sentul City sendiri mengklaim jalan tersebut merupakan hak guna bangunan (HGB) di bawah kendalinya. Jalan desa itu disebut sebagai 'pinjaman' sementara perusahaan untuk sebuah pesantren yang berada di area tersebut lantaran memerlukan sebuah jalan.

Sutrisno kemudian mengungkapkan fakta lain, di mana jalan itu sudah ada sejak puluhan tahun silam sebelum ada pesantren.

"Pondok pesantren baru dibangun baru-baru ini. Seingat saya di atas 2010, sedangkan jalan ini sejak saya beli 2000-an, sekitar 2001-2002 jalan sudah ada, jembatan sudah ada, belum ada pesantren. Jadi kalau ngasih pinjaman ke pesantren wong jalan itu udah ada sebelum pesantren kok, gimana logika yang dibangunnya. Jadi jangan main menang-menangan lah, negara ini kan negara hukum ya. Jangan karena kita kuat lalu abaikan hukum. Kita perlu ikuti aturan hukum yang berlaku di negara ini," kata Sutrisno.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jalan tersebut merupakan jalan desa. Sutrisno meminta aparat penegak hukum untuk terjun langsung menyelidiki karena diduga adanya transaksi perpindahan kepemilikan.

"Kalaupun itu betul tanah milik dia (Sentul City), berarti ada transaksi antara jalan milik pemerintah atau milik umum masyarakat tapi sekarang dimiliki privat, ya ini kita minta KPK untuk periksa siapa yang melakukan penjualan tanah itu, dan kita minta Presiden Jokowi sangat getol untuk menyelesaikan soal tanah ini, dan ini ada tanah milik pemerintah yang bunyinya jalan desa kemudian diakui pihak lain, mohon untuk diperiksa," ujarnya.

Sentul City sudah buka suara terkait insiden kasus penyetopan perbaikan jalan yang disebut Sutrisno di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, oleh pihak yang diduga sebagai preman. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dan Minggu, Mei 2023.

Warga menganggap jalan itu adalah jalan desa yang tertera dalam sertifikat BPN, bukan jalan Sentul City, sehingga tak ada alasan untuk menghalangi pembangunan jalan.

Manajemen mengklarifikasi bahwa pihak yang melakukan penyetopan pembangunan jalan memang dari karyawan Sentul City. Manajemen menolak anggapan orang-orang yang menyetop di lapangan disebut sebagai preman. ● **pra**

Pertokoan di Bogor Kebakaran, Kerugian Mencapai Rp3 Miliar

BOGOR (IM)- Kebakaran hebat melanda kompleks pertokoan di Jalan Raya Bogor-Dramaga, Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, Jawa Barat Jumat (26/5) pagi. Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting tersebut.

Selain menghanguskan sebuah minimarket, api juga membakar toko mebel dan sebuah mesin anjungan tunai (ATM). Kebakaran tersebut menyebabkan ruas jalan Bogor-Dramaga macet panjang.

Api yang semula berasal dari sebuah minimarket lantai satu langsung membesar dan menjalar ke lantai dua. Kobaran api semakin membesar karena di lantai dua terdapat toko mebel dan elektronik dengan bahan-bahan yang mudah terbakar.

Sanjaya (22), salah satu saksi di lokasi mengungkapkan kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 05.00 WIB yang dimulai dari minimarket. "Tadi awalnya dari itu, terus membesar merembet ke atas. Ada bunyi bledug-bledug gitu, besar aja apinya," ungkap Sanjaya.

Selain membakar minimarket dan toko mebel, api juga membakar sejumlah kios kelontong dan makanan yang berada di lantai bawah.

Pemilik kompleks pertokoan, Hariyanto mengungkapkan akibat kebakaran tersebut kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Di dalam minimarket juga terdapat mesin anjungan tunai (ATM) namun belum diketahui apakah ikut terbakar.

"Ya perkiraan Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Banyak ini," ungkap Hariyanto.

Sementara itu hingga Jumat pagi petugas masih berusaha memadamkan api. Petugas mulai melakukan pendinginan setelah berhasil memadamkan seluruh api.

Diperkirakan kebakaran terjadi akibat korsleting. Komandan regu Pemadam Kebakaran Kota Bogor, Royani menyatakan dari keterangan saksi di lokasi api diperkirakan berasal dari korsleting.

"Menurut keterangan saksi api dari korsleting listrik di salah satu bagian toko," ungkapnya. ● **jay**

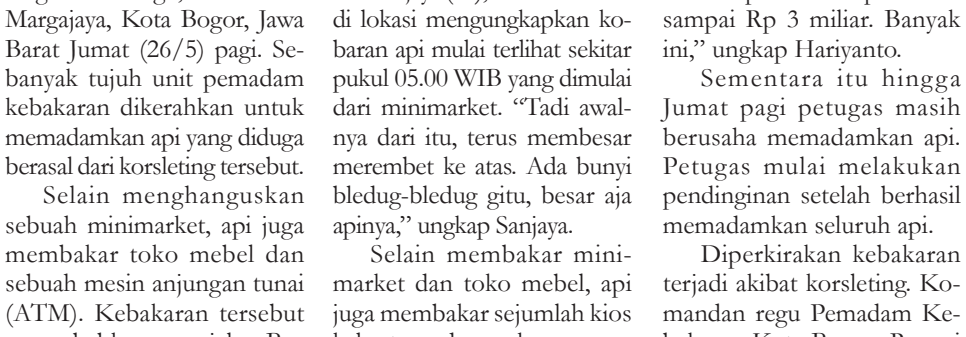

IDN/ANTARA

JAMAAH CALON HAJI TERTUA DI EMBARKASI PALEMBANG

Petugas membantu jamaah calon haji Kartoyitno bin Ahmad Sadiyo (kiri) menuju kamarnya di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (26/5). Kartoyitno bin Ahmad Sadiyo yang merupakan jamaah calon haji asal Kabupaten OKU Timur, Sumsel tersebut menjadi jamaah calon haji tertua di embarkasi Palembang dengan umur 105 tahun yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun 2023.

BELAJAR DARI KASUS DI DESA CIDOKOM

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Evaluasi Menyeluruh Program Sami Sade

CIBINONG (IM)- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Kepala Desa Cidokom yang kini dilidik terkait kasus dugaan penyelewengan dana desa tidak membuat program Sami Sade bisa dikatakan sebagai produk gagal.

"Adanya kasus hukum di Desa Cidokom terkait dugaan penyelewengan dana desa untuk program Sami Sade bukan berarti programnya jelek. Masih banyak Pemdes lain yang pekerjannya baik hingga DPRD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendukung program tersebut," kata Rudy, kemarin.

Dia menuturkan, ke depan DPRD Kabupaten Bogor mendorong agar aparatur pemerintahan desa diberikan bimbingan teknis. Hal itu dilakukan agar kasus dugaan penyelewengan dana desa Sami Sade seperti di Desa Cidokom tidak terulang.

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya harus menyiapkan anggaran Bimteknya, baik dari segi insfrastruktur, administrasi maupun hukum," tegasnya.

Walaupun begitu, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra ini pun tetap mendukung apabila aparat penegak hukum membina maupun menindak aparatur pemerintahan desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

"Kalau ada Kades atau pemerintah desa melakukan pelanggaran hukum, tentunya kami menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum," tegas Rudy.

Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman berpendapat harus ada evaluasi, atas banyaknya kegiatan pelaksanan program Sami Sade yang meluncur ke awal tahun.

Selain itu, hasil pantauannya ke desa-desa. Banyak insfrastruktur jalan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti ketebalan aspal maupun beton.

"Harus ada evaluasi baik oleh SKPD terkait, maupun inspektorat atas molornya sejumlah proyek insfrastruktur Sami Sade. Kami selama ini kerap menerima aduan, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan ketidak sesuaian spesifikasi atau rendahnya kualitas pekerjaan," ucap Usep. ● **gio**